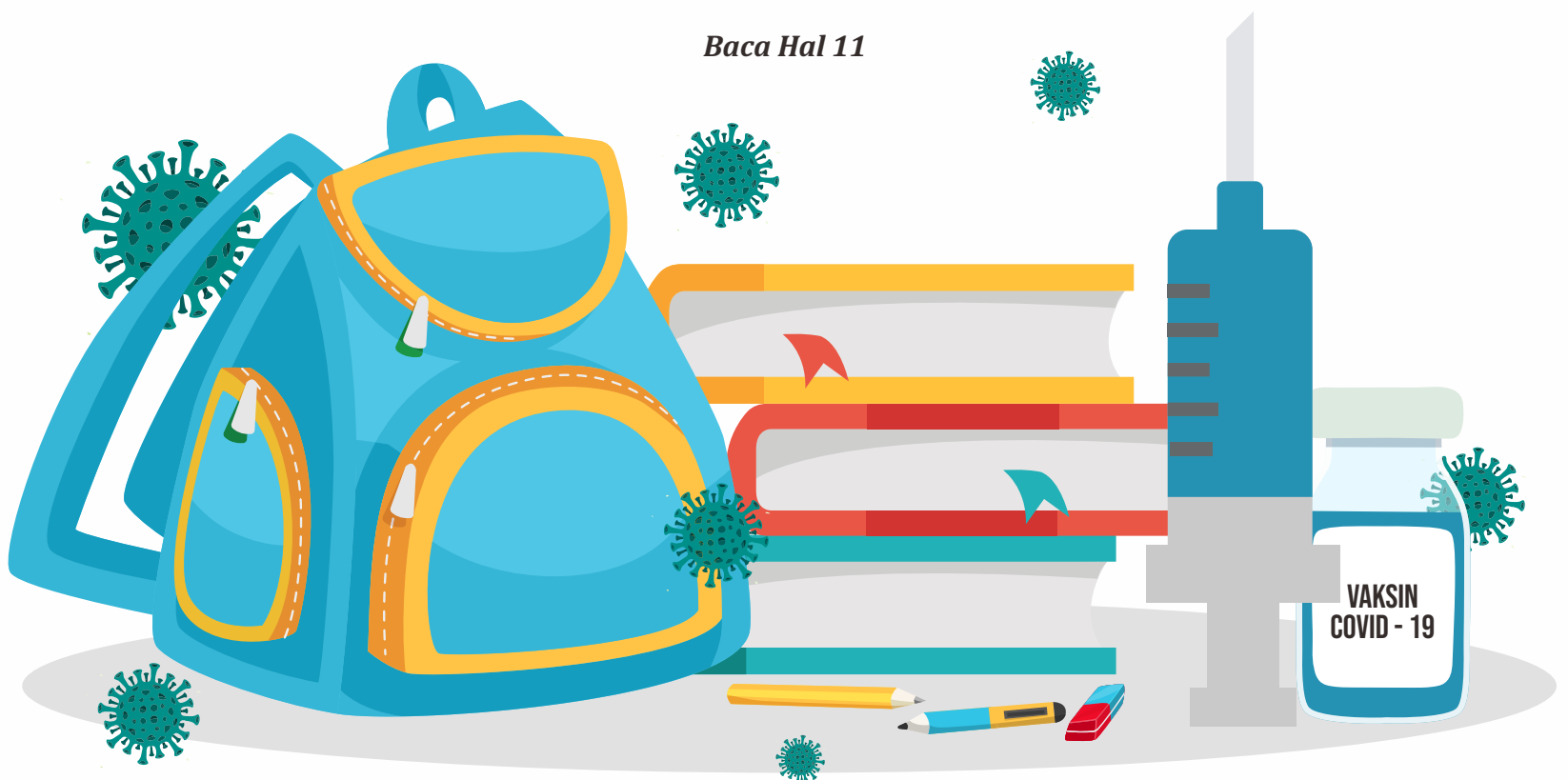




MIMPI JOKOWI, BUKA SEKOLAH DI BULAN JULI

Tak hanya mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi seluruh rakyat terutama 'geng emak-emak' berharap sekolah tatap muka segera bisa dilakukan lagi. Target pemerintah, Juli nanti sekolah sudah bisa beroperasi kembali. Tapi ada syaratnya, yaitu vaksinasi Covid-19 terhadap 5 juta tenaga kependidikan rampung. Perjuangan untuk mencapai target itu tak mudah. Hingga saat ini saja, tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi target utama vaksin, baru 53 persen yang mendapatkan dosis kedua. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membenarkan bila stok vaksin mulai menipis. Rakyat butuh solusi, bukan sekadar mimpi.

Baca Hal 11



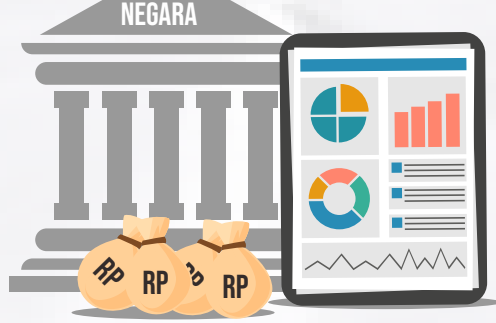
JUMLAH PESERTA DIDIK MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, TAHUN AJARAN 2017/2018 - 2019/2020 (DALAM RIBUAN)

JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN AJARAN		
	2017/2018	2018/2019	2019/2020
SD	25.486,5	25.238,2	25.203,4
SMP	10.125,7	9.981,2	10.112,0
SMA	4.783,6	4.845,1	4.976,1
SMK	4.904,0	5.009,3	5.249,2

JUMLAH SEKOLAH MENURUT STATUS SEKOLAH DAN JENJANG PENDIDIKAN PADA TAHUN AJARAN 2018/2019 DAN 2019/2020

JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN AJARAN		PERTUMBUHAN SEKOLAH (%)	
	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020
SD	25.486,5	25.238,2	0,29	0,51
SMP	10.125,7	9.981,2	1,74	2,33
SMA	4.783,6	4.845,1	1,46	1,80
SMK	4.904,0	5.009,3	2,58	1,69

sumber : Kementerian dan Kebudayaan ,2020

GOVERNMENTTODAY

PENDAPATAN TEKOR, RESESI MASIH 'MENGEKOR'

Jakarta- Setoran pajak Indonesia di awal tahun ini makin seret. Per akhir Januari 2021, penerimaan pajak tercatat Rp 68,5 triliun. Angka ini masih 5,6% dari target APBN 2021 dan 15,3% di bawah realisasi Januari 2020.

Padahal, pajak menggambarkan situasi ekonomi yang ada. Sebab, pajak dibayarkan atas aktivitas ekonomi seperti transaksi atau nilai tambah. Jadi kalau setoran pajak seret bisa dikata situasi ekonomi sedang lesu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mencatat defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) hingga Januari 2021 tercatat mencapai Rp45,7 triliun atau 4,5% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.006,4 triliun. Realisasi defisit anggaran itu setara dengan 0,26% PDB.

Pengamat ekonomi dari INDEF Nailul Huda mengatakan pemerintah sejatinya sudah diberi kelonggaran untuk memperbesar defisit APBN. Tapi memang fokusnya defisit ini tidak boleh membesar dan mengecil seiring dengan program pemulihan ekonomi.

"Tapi saya lihat sepertinya pengeluaran pemerintah untuk PEN membesar namun di satu sisi penerimaan pajak belum pulih juga. Artinya defisit terancam melebar," kata Huda, Rabu (24/02).

Dia melihat pemerintah akan melakukan

perubahan APBN lagi di tahun ini dengan mengurangi belanja dan menyesuaikan target penerimaan. Kalau seperti itu, mau tidak mau ada anggaran yang harus kita korbankan. "Menurut saya anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel masih bisa dipangkas. Kemudian anggaran infrastruktur seharusnya bisa dipangkas juga. Termasuk dana SWF juga bisa dipangkas," tambahnya.

Sementara itu Chief Economist Tanam Duit Ferry Latuhihin mengingatkan pandemi Covid19 saat ini jelas menjadi sumber dari masalah likuiditas. Karena ada penurunan permintaan dan penawaran akibat dibatasinya mobilitas masyarakat.

"Dan untuk menahan defisit jelas dibutuhkan peran Pemerintah dan Bank Indonesia melalui instrumen surat utang dan Quantitative easing. Kedua instrumen tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Setidaknya hingga program vaksin mencapai herd immunity," kata Ferry.

Tapi, dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan juga dengan menggunakan program stimulus pemerintah untuk mengganjal defisit pemasukan. "Kemudian bisa ditambah dari SWF yang dikombinasikan dengan program pembangunan seperti industri mineral. Ini akan semakin menarik investasi dunia," katanya.

Diprediksi Masih Resesi

Perekonomian Indonesia diproyeksi masih

terkontraksi pada kuartal I-2021 sebesar 0,25 hingga 1%. Ini tak lepas dari kondisi pandemi covid-19 yang belum juga berhasil ditangani.

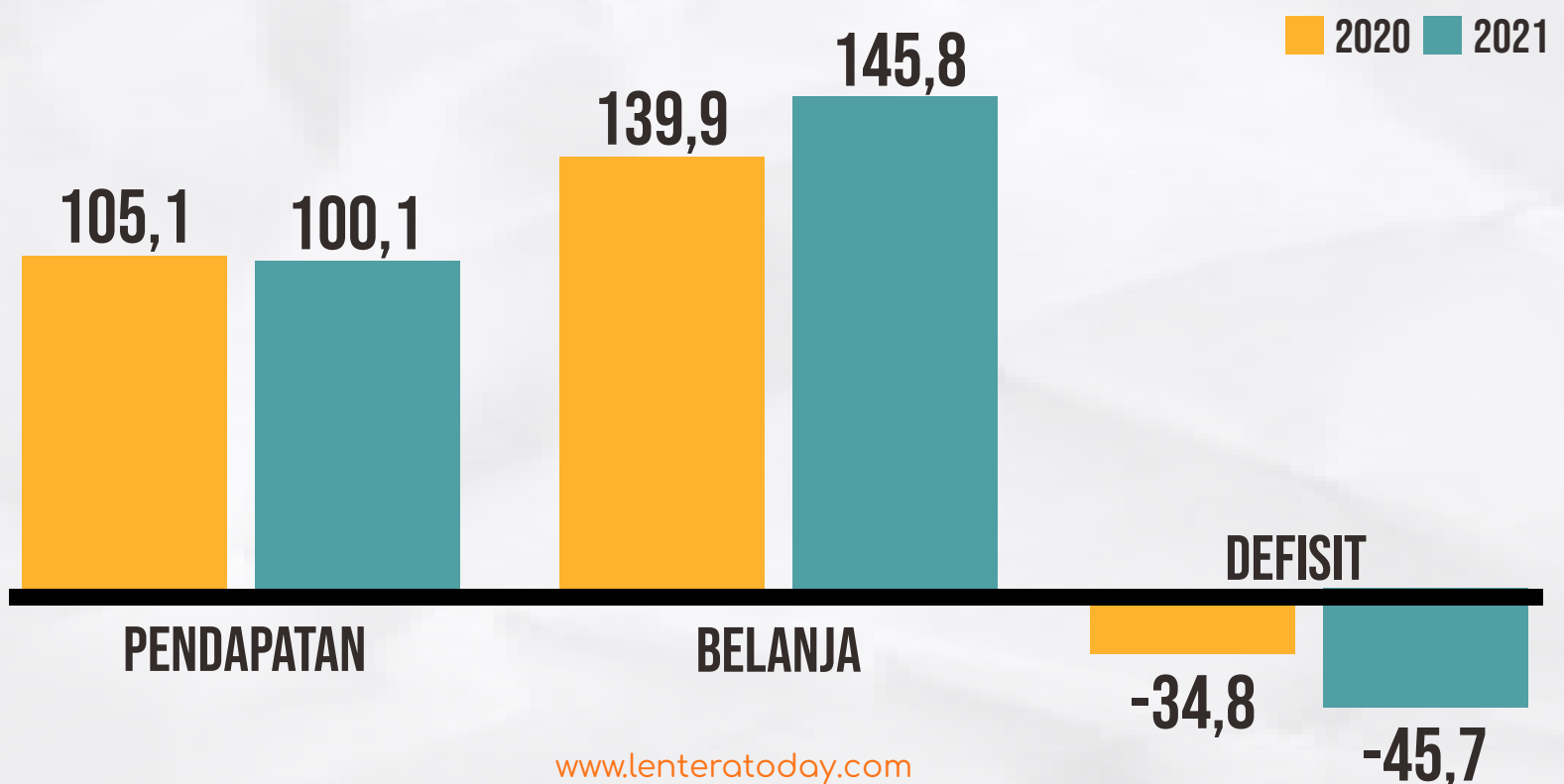
Demikianlah diungkapkan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah. Apalagi di awal tahun pemerintah menerapkan pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mengurangi mobilitas masyarakat.

"Sulit mengharapkan Q1 bisa tumbuh positif. apalagi pada Q1 2020 itu (pertumbuhan ekonomi) masih positif. dengan kisaran 2% sampai 3%. Sehingga basis perhitungan ekonomi masih tinggi," kata Piter melanjutkan.

Oleh karena itu, Piter menyarankan agar pemerintah fokus untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang merupakan kunci pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa meningkatkan ketahanan masyarakat dan dunia usaha, karena mereka harus bertahan dan berjuang di tengah pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2020 sebesar 2,97% secara tahunan (year on year). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari Kuartal I-2019 yang mencapai 5,07% dan lebih rendah dari Kuartal IV-2019 yang tercatat 4,97%. (ist)

REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN DEFISAT APBN (JANUARI 2020 & 2021)



DPR DESAK KEMENKES MENERTIBKAN RS PEMOTONG INSENTIF NAKES

JAKARTA- Polemik temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila manajemen rumah sakit (RS) memotong insentif tenaga kesehatan (nakes) hingga 70 persen berlanjut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bilang pihaknya hanya bertugas membayar. DPR RI pun mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera menelusuri dugaan itu.

"Tidak boleh ada pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan selama menjadi garda terdepan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Jika ada dugaan seperti itu, tentu pihak Kementerian Kesehatan harus menelusuri secara tuntas," kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay, Rabu (24/02).

Ketua Fraksi PAN itu juga meminta Kemenkes memberi penjelasan kepada KPK terkait pemotongan insentif tersebut. Sebab, kata Saleh, Kementerian Kesehatan telah membantah adanya pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan.

Di samping itu, Saleh mendorong organisasi dan asosiasi rumah sakit untuk memberi sanksi kepada rumah sakit yang terbukti memotong insentif tenaga kesehatan. "Untuk itu, segera ditertibkan. Jadi ini harus ditemukan ini siapa pelakunya, di mana, berapa banyak," kata dia.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya berdasarkan sistem, hanya menyalurkan anggaran kepada Kemenkes. Karena itu, segala keputusan terkait adanya pemangkasan insentif nakes atau tidak, bukan tanggung jawab Kemenkeu.

"Kemenkeu hanya membayar, yang punya kebijakan dan diskresi itu Kemenkes dan pemda atau Dinas Kesehatan," ujarnya. Kendati demikian, Yustinus menjelaskan, tidak seluruhnya juga penyaluran insentif nakes di bawah tanggung jawab Kemenkes.

Bisa jadi, keputusan pemotongan insentif nakes jika benar terjadi ada di pemerintah daerah (pemda) yang membawahi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). "Tidak semuanya di bawah Kemenkes, tapi yang RSUD di bawah pemda, sebaiknya dielaborasi ke Kemenkes."

PPNI Banjir Keluhan

Ketua Satgas Covid-19 DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Jajat Sudrajat mengakui menerima banyak keluhan dari nakes terkait pemotongan insentif penanganan pasien Covid-19 oleh manajemen rumah sakit.

"Terkait pemotongan insentif memang banyak dikeluhkan oleh Nakes," kata Jajat.

Meski tak menyebut detail jumlah keluhan, berdasarkan laporan yang masuk Jajat membeberkan pemotongan marak terjadi sejak ada kebijakan pemberian insentif. Pasalnya insentif hanya diperuntukkan bagi nakes yang menangani pasien Covid-19.

Alhasil, mayoritas manajemen RS pun memotong insentif nakes yang menangani Covid-19 untuk dibagikan ke nakes maupun tenaga penunjang yang tidak menangani pasien Covid-19 secara langsung. Kondisi tersebut menurut Jajat merupakan alasan mayoritas manajemen RS.

"Yang dapat insentif dalam aturan Menkes hanya nakes yang merawat pasien Covid-19 saja. Sedangkan yang di poliklinik, ruang perawatan biasa dan lain lain tidak dapat insentif. Oleh karena itu pemotongan dilakukan untuk membagi insentif dengan nakes tersebut," terang dia.

Karena itu Jajat menyarankan pemerintah untuk merevisi kebijakan pemberian insentif agar pemotongan tidak lagi terjadi. Menurut dia, insentif harus diberikan ke seluruh nakes baik yang menangani pasien Covid-19 secara langsung maupun tidak, terutama perawat di semua unit layanan.

"Dalam catatan kami PPNI dan organisasi profesi lain. Nakes yang terpapar dan meninggal mayoritas yang di luar layanan langsung Covid-19. Hal ini karena nakes yang melayani langsung Covid-19, APD-nya lebih baik dibanding di luar itu," ujar Jajat. (ist)

INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN UNTUK TENAGA MEDIS

Pemerintah memberikan insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19, hal itu diatur dalam keputusan Menkes Nomor HK.01.07.MENKES/278/2020

Jenis Tenaga Kesehatan dan Besaran Insentif



Dokter Spesialis
Rp 15 Juta



Dokter Umum
Rp 10 Juta



Bidan dan Perawat
Rp 7,5 Juta



Tenaga Medis Lainnya
Rp 7,5 Juta

Insentif dan santunan kematian berlaku mulai maret 2020-Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

APBD

SUMBER DANA

APBN

Insentif diberikan kepada Nakes yang bertugas di faskes/institusi kesehatan berikut :

RS khusus rujukan pasien Covid-19

Puskesmas

Laboratorium yang ditetapkan Kementerian Kesehatan

RS rujukan baik milik pemerintah/swasta/TNI/Polri

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Dinkes Provinsi, Kabupaten atau Kota

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP)

Tenaga Kesehatan yang bekerja di KKP, BTKL-PP, BBTKL-PP, Dinkes, Puskesmas dan Laboratorium yang telah ditetapkan mendapatkan insentif setinggi-tingginya Rp. 5 Juta

Tenaga Kesehatan yang meninggal saat bertugas diberikan santunan kematian sebesar Rp. 300 juta dengan syarat tertular Covid-19 saat bertugas di faskes atau institusi kesehatan yang melayani Covid-19

CEGAH PENULARAN CORONA, 127 LOKASI PARKIR DI SURABAYA BAKAL PAKAI QR CODE

SURABAYA – Sebagai upaya meminimalisir risiko penularan virus Covid-19, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya akan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)-- standar pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia-- dalam pelayanan parkir. Kota Pahlwan sendiri hingga saat ini sudah menyediakan 127 lokasi parkir khusus.

"Jadi tinggal menunjukkan QRIS di aplikasi smartphone dan tinggal ditempelkan. Untuk yang di tepi jalan yang tidak ada palang otomatis, tetap ada penjaga parkir yang dibekali smartphone," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad di Surabaya, Rabu (24/02).

QRIS ini digunakan agar proses transaksi dalam pelayanan parkir lebih mudah, lebih cepat, dan terjaga keamanannya. "Kami saat ini masih menyosialisasikan kepada masyarakat," ia menambahkan.

Ia mengemukakan, penggunaan standar pembayaran tersebut meminimalkan risiko penularan Covid-19 sekaligus mencegah kebocoran uang layanan parkir.

Untuk diketahui, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyediakan tempat parkir

khusus di 127 lokasi yang meliputi 112 lokasi parkir tanpa palang pintu otomatis dan 15 lokasi parkir dengan palang pintu otomatis.

Pemkot juga memiliki gedung parkir di enam lokasi, yakni di kawasan Jalan Mayjend Sungkono, UPTSA Siola, Balai Pemuda, Genteng Kali, Kertajaya, dan RSUD dr M Soewandhi.

Selain itu ada lapangan parkir di kawasan Jalan Adityawarman, Jalan Arif Rahman Hakim, Convention Hall, UPTSA Menur, Lapangan Hockey, dan Dinas Kesehatan serta area parkir di tempat wisata seperti kompleks Sunan Ampel, Tugu Pahlawan, dan THP Kenjeran.

Sementara itu, ada tempat parkir tanpa palang pintu otomatis di tujuh kelurahan, 21 kecamatan, 47 puskesmas dan rumah sakit, empat kantor pemerintah, lima taman, dan delapan sentra perdagangan.

"Selain itu ada di lima pasar, dua lokasi di gelanggang remaja dan eks Hi-tech Mall, dan 13 tempat di masjid, makam, dan tempat wisata. Itu dikelola oleh pemerintah daerah dan merupakan objek retribusi tempat khusus parkir sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018," kata Irvan. (Ard)



Kode QRIS untuk melakukan pembayaran untuk pelayanan parkir.

Foto: Adini/LenteraToday

CUACA EKSTREM DI JATIM

LONGSOR DI PAMEKASAN, 5 SANTRI TEWAS TERTIMBUN

Pamekasan- Cuaca ekstrem terus membayangi wilayah Jawa-Bali termasuk Jawa Timur (Jatim). Tanah longsor yang memakan korban jiwa kini terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Lima santri Pondok Pesantren Annidhomiyah diketahui meninggal dunia akibat tebing longsor Rabu (24/02) sekitar pukul 02.00 WIB. Lokasi kejadian di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, sekitar 45 kilometer ke arah utara Kota Pamekasan.

"Total jumlah korban tujuh orang, lima orang meninggal dunia, satu orang patah tulang dan satu orang santri lainnya selamat," kata Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Budi Cahyono.

Kelima santri korban tebing longsor yang meninggal dunia itu, semuanya berasal dari luar Kabupaten Pamekasan, yakni dari Kabupaten Jember sebanyak tiga orang, Sampang satu orang dan dari Kabupaten Sumenep sebanyak satu orang.

Masing-masing bernama Santi (14) warga Desa Dukohmencek, Kecamatan Sukorambi, Nur Azizah (13) dari desa yang sama, serta Siti Komariyah (17) asal Desa Palampang, Kecamatan Sumber Jambi, Jember Jawa Timur. "Tiga orang berhasil dievakuasi sesaat setelah kejadian, dan dua santri lainnya, tadi sekitar pukul 7.00 WIB," kata Budi Cahyono, menjelaskan.



Bangunan Pondok Annidhomiyah, Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan tertimbun tanah longsor

Korban meninggal dunia dari Kabupaten Sampang bernama Robiatul Adawiyah (14) asal Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang, sedangkan yang dari Kabupaten Sumenep bernama Nabila (12), asal Desa Semping Barat, Kecamatan Pasongsongan.

Dua di antara kelima jenazah korban tebing longsor ini sudah berada di rumah duka, sedangkan tiga orang santri meninggal lainnya yang berasal dari Jember akan diantarkan. "Saat ini kami masih berkoordinasi untuk pemulangan ketiga orang jenazah ini," kata Budi Cahyono, menjelaskan.

Camat Pasean Munafi mengatakan longsor berasal dari tebing setinggi 12 meter yang berada di dekat bangunan pesantren asuhan KH Muhedi itu. Longsor langsung menimpa dua kamar pondok putri yang ditempati tujuh orang. Warga di sekitar pesantren langsung bergotong royong menyingkirkan material tanah yang menimpa dua kamar pondok

santri putri.

Pohon kelapa yang menjadi penunjang tebing, ikut terbawa longsor tanah sehingga menimpa bangunan pesantren. "Ada beberapa bangunan pesantren yang rusak parah karena temboknya jebol, atapnya runtuh," ungkap pria yang juga Wakil Ketua PCNU Pamekasan ini.

Kecamatan Pasean termasuk salah satu kecamatan dengan status daerah rawan longsor diantara tujuh kecamatan lainnya yang masuk daerah rawan bencana lainnya.

Selain Pasean, kecamatan lain yang juga masuk dalam status rawan bencana tanah longsor, Kecamatan Waru, Pakong, Pegantenan dan Kecamatan Kadur, Pamekasan. Dua kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu, masuk wilayah kecamatan dengan status rawan banjir.

Mengantisipasi longsor susulan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur (Jatim) segera melakukan evakuasi. Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Yanuar Rahmadi di lokasi bencana mengatakan pihaknya berencana meng-evakuasi seluruh penghuni pondok yang dekat dengan perbukitan dan yang perlu diawasi adalah yang dekat dengan tebing-tebing. "Setelah saya amati kondisi pondok pesantren memang dekat dengan perbukitan, dan dibawah perbukitan itulah tempat para santri menginap," terang Yanuar.(wan)

Foto: Sahlan Kurniawan-LenteraToday

OPTIMALKAN PERAN *KIM* SAAT PANDEMI, DINAS KOMINFO KABUPATEN PASURUAN MANFAATKAN DBHCHT



Rapat Evaluasi Kegiatan KIM Tahun 2020 serta Rencana Kegiatan KIM Tahun 2021 di Ruang Rapat Dinas Kominfo Kab.Pasuruan

PASURUAN- Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan terus berupaya mengoptimalkan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Optimalisasi perannya sangat dibutuhkan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pun menjadi salah satu penyokong kegiatan sosialisasi KIM terkait corona saat ini.

“Kita patut bangga dengan eksistensi dan prestasi teman-teman KIM Kabupaten Pasuruan. Dengan kebanggaan ini pula, KIM harus terus meningkatkan keaktifannya dalam melaksanakan diseminasi informasi ke masyarakat. Baik di website maupun media sosial yang dikelola,” kata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad.

Tak dipungkiri, berbagai kegiatan tersebut tentunya membutuhkan anggaran agar terlaksana dengan optimal. “Di Tahun 2021 ini, selain melaksanakan pembinaan, kami juga akan memaksimalkan penggunaan DBHCHT untuk sosialisasi KIM. Jadi, teman-teman harus lebih cepat lagi dalam mengolah informasi agar tersampaikan ke masyarakat secara menyeluruh,” katanya.

Salah satu kegiatan terbaru KIM adalah Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2020 serta Rencana Kegiatan Tahun 2021. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Kominfo, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, forum diskusi yang dilaksanakan sesuai standart protokol kesehatan tersebut melibatkan pengurus Forum KIM Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya, Syaifudin Ahmad menyampaikan bahwa fokus kerja Dinas Kominfo dalam melakukan pembinaan KIM di tahun anggaran 2021 masih bersifat virtual, dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Ke depan, ada kemungkinan untuk melaksanakan pertemuan secara tatap muka. Tentunya

dengan harus menerapkan protokol kesehatan serta pembatasan jumlah peserta rapat.

Menurutnya, keberadaan KIM merupakan kebanggaan tersendiri bagian Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan. Sekaligus menjadi tolok ukur bagi perkembangan KIM di Jawa Timur. Sehingga tidaklah mengherankan jika selama ini sering kali menerima kunjungan studi komparasi dari beberapa KIM.

Tidak hanya dari Kabupaten/ Kota di Jawa Timur saja seperti dari Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso saja, melainkan juga dikunjungi KIM dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan, tujuan studies komparasi tersebut untuk melihat lebih dekat tentang bagaimana strategi Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan KIM.

Sebagai evaluasi aktivitas KIM di Tahun 2020, Kepala Dinas Kominfo juga meminta kepada pengurus KIM untuk lebih me-

maksimalisasi teknologi informasi sebagai tools untuk mempermudah komunikasi. Sekaligus melihat tren pemanfaatan teknologi serta jenis-jenis media komunikasi sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat.

“Karena tren media bisa saja berubah dengan sangat cepat. Dulu orang mungkin hanya mengenal blog, sekarang sudah banyak orang yang beralih ke media sosial. Seperti Instagram, Youtube dan Tiktok. Bahkan Facebook dan Twitter juga sudah mulai ditinggalkan”, serunya.

Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Mariyati menambahkan, sneakily kegiatan masih pandemi, kegiatan KIM harus tetap aktif secara online. Termasuk tetap bersinergi dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan.

“Tugas pokok KIM adalah mendorong dan memotivasi sesama teman KIM untuk lebih aktif lagi dan berbagi ilmu. Jangan menjadikan pandemi Covid ini sebagai alasan untuk kita tidak lebih baik lagi. Jadi dengan adanya pertemuan ini mari kita satukan semangat dan kita susun kembali strategi pembinaan yang akan datang”, pungkasnya.

Lebih lanjut, ia berharap pada Tahun Anggaran 2021, pembinaan KIM dapat berjalan semaksimal mungkin dengan penerapan sistem punish-reward, dimana KIM yang berada di cluster teratas bisa turun ke cluster bawah apabila tidak aktif sebagai bentuk punishment (hukuman). Begitu juga dengan KIM yang berada di cluster bawah sangat berpeluang naik ke cluster atasnya, apabila aktif dalam hal diseminasi informasi. Sebagai sesudahnya, KIM yang bersangkutan akan diikutsertakan di setiap sosialisasi/pembinaan KIM. (adv)



Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad.

IMPRESSION

Via Vallen

NYANYIKAN SOUNDTRACK '**RAYA AND THE LAST DRAGON**' BESUTAN DISNEY

Foto : istimewa



Penyanyi dangdut Via Vallen ditunjuk Disney Indonesia menyanyikan soundtrack film animasi *Raya and The Last Dragon* yang akan tayang pada Maret 2021. Nantinya, pelantun 'Sayang' ini akan menyanyikan lagu berjudul 'Kita Bisa', yang merupakan versi bahasa Indonesia dari original soundtrack film tersebut. Luar biasa!

Via Vallen akan terlibat dalam film animasi terbaru Disney, *Raya and the Last Dragon*. Disney Indonesia mengumumkan Via Vallen akan menjadi pengisi lagu tema film tersebut dalam versi bahasa Indonesia yang bertajuk *Kita Bisa*. Lagu ini diadaptasi dari lagu tema original film *Raya and the Last Dragon*, *Lead the Way*, yang dinyanyikan Jhené Aiko.

Lirik dalam bahasa Indonesia itu akan menggambarkan perjalanan Raya dan teman-temannya dalam mempersatukan kembali Kumandra berbekal kerja sama dan kepercayaan pada sesama. "Ini pengalaman spesial bagi saya, karena *Raya and the Last Dragon* merupakan film Disney pertama yang terinspirasi dengan budaya yang begitu dekat dengan kita, termasuk Indonesia," kata Via Vallen dalam keterangan tertulis.

"Saya harap, kolaborasi spesial ini dapat membawa *Raya and the Last Dragon* lebih dekat dengan para penonton di Indonesia," lanjutnya.

Raya and the Last Dragon merupakan film animasi yang menampilkan petualangan

menantang seorang pendekar bernama Raya. Dahulu kala, manusia dan naga hidup berdampingan di Kumandra. Suatu hari, kejahatan mengancam rakyat Kumandra dan membuat para naga harus mengorbankan diri untuk menyelamatkan negeri tersebut.

Hingga 500 tahun kemudian, kejahatan yang sama terulang kembali dan nasib Kumandra bergantung pada Raya untuk menemukan sang naga terakhir guna mempersatukan kembali Kumandra. Dalam petualangan itu, Raya akan bekerja sama dengan armadillo canggung bernama Tuk Tuk.

Seperti dilansir Screen Rant, *Raya and the Last Dragon* mengikuti jejak film *Moana* yang menceritakan kisah asli berdasarkan mitos dan budaya dari wilayah tertentu. Tim produksi mengaku terinspirasi dari mitos di Asia Tenggara. Tim kreatif pun mengambil latar Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam melakukan riset.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya setempat, Disney sengaja memilih Adele

Lim untuk menulis cerita. Penulis naskah *Crazy Rich Asian* ini lahir dan tumbuh di Asia Tenggara.

Film animasi ini disutradarai oleh Don Hall dan Carlos López Estrada dengan Paul Briggs dan John Ripa sebagai co-sutradara. Osnat Shuhrer dan Peter Del Vecho bergabung sebagai produser, bersama Qui Nguyen.

Kelly Marie Tran dipastikan bakal menjadi pengisi suara karakter Raya. Sementara itu, Awkwafina akan menjadi pengisi suara karakter Sisu, naga dalam film tersebut.

Film *Raya and the Last Dragon* akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada Maret mendatang. Sedangkan lagu *Kita Bisa* akan dirilis terlebih dahulu di seluruh digital streaming platform mulai 26 Februari. (ist)



Kolaborasi Spesial Via Vallen untuk Film Terbaru Disney's 'Raya and the Last Dragon'

Foto: PR Disney





Foto : Andrea Piacquadro / Pexels

MANFAAT KACAMATA ANTI RADIASI UNTUK KESEHATAN MATA

1. Kamu akan mendapatkan kejernihan visual dari lapisan anti radiasi karena lebih banyak cahaya yang tertahan sekaligus menghilangkan silau.
2. Menghilangkan pantulan keras cahaya yang diterima oleh lensa kaca mata kamu.
3. Selain melindungi cahaya juga melindungi kaca mata sehingga lebih awet dan tidak sering mengganti lensa kaca mata.
4. Mengurangi ekposur cahaya biru, untuk melawan ketegangan mata setelah lama menatap layar.

PERLUKAH KACAMATA ANTI-RADIASI SAAT SERING LIHAT GADGET?

Saat pandemi Covid-19 melanda, banyak kegiatan yang mau tidak mau dilakukan secara daring alias online. Walhasil, mulai anak-anak sekolah hingga pekerja, makin lama berada di depan layar gawai ataupun laptop demi menyelesaikan pekerjaan. Belum lagi yang suka marathoning menonton film atau drama favorit dan menjelajah media sosial.

Tidak heran banyak masyarakat yang menggunakan kacamata anti radiasi untuk mengurangi pantulan cahaya. Sebenarnya apa fungsi kacamata anti radiasi?

Kacamata anti radiasi ini mengadopsi teknologi pelapisan ion vakum yang canggih dan dapat memblokir radiasi elektromagnetik

dari sinar yang terpancar dari layar gawai pintar kamu atau laptop. Teknologi pada kacamata anti radiasi ini membuat mata tidak merasakan efek samping langsung dari pemakaian gadget terlalu lama sehingga meminimalisir kerusakan indera penglihatan.

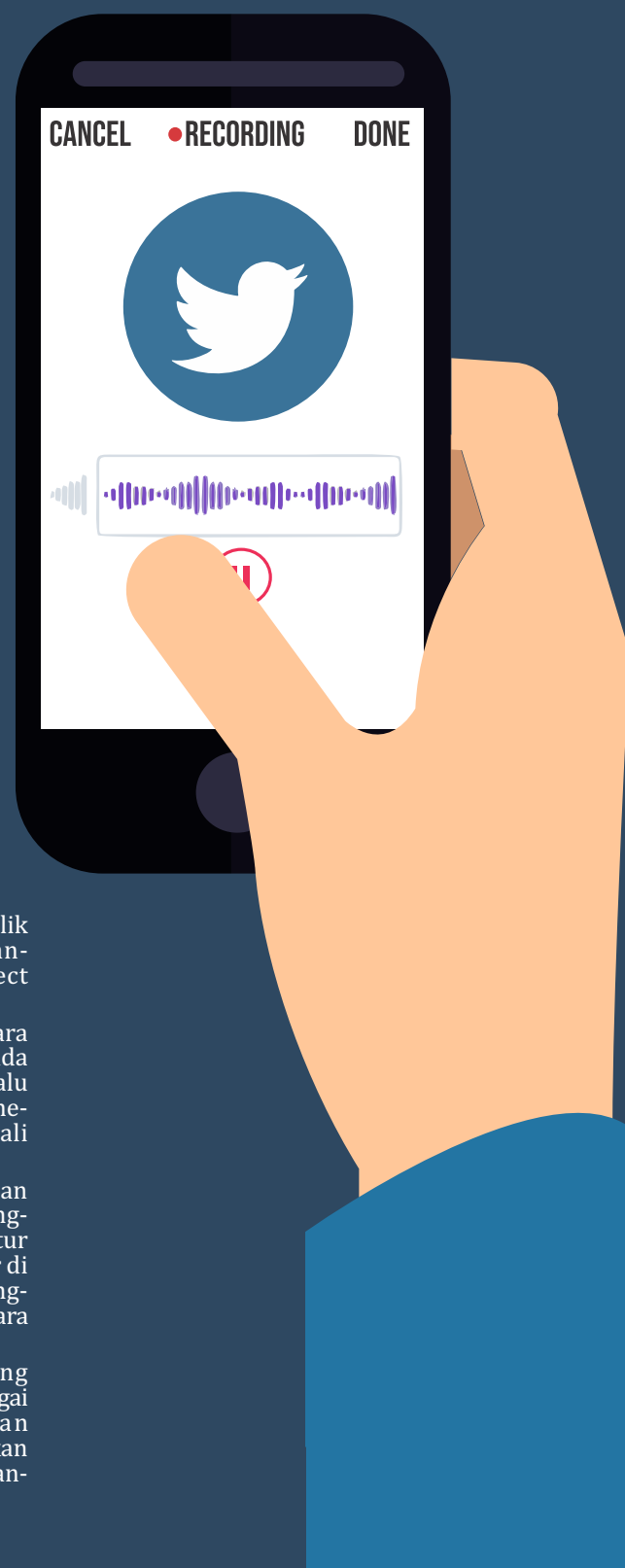
Lensa kacamata yang mengandung bahan anti radiasi ini dapat menyerap gelombang mikro frekuensi rendah dan menurunkan risiko terjadinya demam, sakit kepala, mata yang kelelahan dan kekeringan. Kacamata ini memiliki fungsi penetrasi dan absorpsi yang berbeda-beda sesuai dengan lampu masing-masing. Kacamata anti radiasi juga melindungi mata dari cahaya biru yang

dapat terlihat oleh mata manusia dari jarak 380 nm hingga 500 nm.

Cahaya biru ini ada dimana-mana karena sinar matahari adalah sumber utamanya. Sebenarnya cahaya biru inilah yang membuat langit tampak biru bagi mata manusia.

Paparan sinar HEV juga dapat meningkatkan gejala seperti sakit kepala, sakit mata, kelelahan, mata kering, dan demam. Ini semua disebabkan oleh cahaya dan frekuensi yang dipancarkan dari teknologi. Di sinilah kacamata anti radiasi berguna. Bagi kalian para pekerja, kacamata anti radiasi ini dapat menghindari mata dari sinar berbahaya dan penggunaannya akan memiliki penglihatan yang jelas. (ist)

MALAS MENGETIK? TWITTER UJI COBA PESAN SUARA VIA 'DM'



Twitter telah mengumumkan inovasi baru yaitu memulai menguji fitur pesan suara baru untuk pesan langsung (DM/Direct Messaging) dengan durasi hingga 140 detik. Fitur eksperimen ini baru tersedia untuk tiga negara saja dari India, Brasil dan Jepang.

"Kami bersemangat untuk membawa pesan suara dalam percobaan DM ke negara tersebut dan memberi orang cara baru untuk mengekspresikan diri dan membantu mereka terhubung melalui nuansa, emosi, dan empati yang dibangun dengan mendengarkan suara seseorang," kata Manish Maheshwari Managing Director Twitter India.

Dengan fitur pesan suara ini pengguna dapat merekam hingga 140 detik sehingga membantu pengguna mengobrol lebih cepat misal dalam kondisi perjalanan atau malas mengetik.

"Kami berdedikasi untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada orang-orang untuk mengekspresikan diri mereka dalam

percakapan di Twitter - baik secara publik maupun pribadi," kata Alex Ackerman-Greenberg, Product Manager for Direct Messages Twitter.

Untuk menggunakan fitur pesan suara pengguna buka dulu percakapan yang ada atau untuk memulai percakapan baru. Lalu ketuk ikon rekam suara untuk memulai merekam pesan. Setelah itu ketuk kembali untuk berhenti merekam

Pengguna juga akan diberikan pilihan untuk mendengarkan pesan sebelum mengklik kirim atau jika ingin dihapus. Meski fitur ini baru dapat digunakan aplikasi Twitter di perangkat Android dan iOS namun pengguna tetap dapat mendengarkan pesan suara tersebut lewat Twitter desktop.

"Kami berharap mengizinkan orang merekam dan mengirim pesan suara sebagai DM akan meningkatkan pengalaman percakapan mereka dengan menambahkan kenyamanan dan ekspresi," kata Ackerman-Greenberg. Tak sabar menungunya! (ist)

Padu Padan Busana Wanita dengan Mobilitas Tinggi

Tak jarang dalam satu hari kamu memiliki lebih dari satu kegiatan, mulai dari bekerja, temu wicara, atau makan malam bersama teman dan pasangan. Tentu kamu pun berupaya untuk tampil stylish dan menyesuaikan outfit dengan acara yang akan dihadiri.

Namun, tidak dapat dimungkiri hal ini menghabiskan waktu banyak untuk memadukan busana. Mulai dari menghadapi kesulitan dalam mencocokkan setiap detail yang akan dikenakan, baik atasan, bawahan, hingga aksesoris seperti tas dan sepatu.

Keadaan akan menjadi semakin sulit apabila tas dan sepatu hanya bisa digunakan untuk satu acara, atau gaya berpakaian tertentu saja.

Di saat seperti inilah tas dan sepatu yang versatile sangat dibutuhkan dan penting untuk dimiliki. Tas dan sepatu yang bersifat fleksibel memudahkan dalam memadukannya dengan fashion item lain, serta dapat disesuaikan dengan acara apa pun yang akan kamu hadiri. Lantas, seperti apa bentuk tas dan sepatu versatile tersebut? Yuk, simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

REMOVABLE QUILTED POUCH

Quilted shoulder bag

adalah tas dengan motif jahitan diagonal seperti selimut yang terbuat dari kain perca. Tas model ini bisa digunakan untuk pergi ke pesta pernikahan, makan malam bersama teman, dan acara keluarga. Kamu akan terlihat stand out dengan membawanya sebagai shoulder bag atau pun digenggam layaknya pouch bag.



SIMPLE SLINGBACK FLATS

Kamu bisa tampil simple

dan santai dengan sepatu slingback flats saat berjalan-jalan bersama teman atau pasangan. Slingback flats bisa menjadi pilihan karena mudah dipadukan dengan berbagai outfit, seperti mini dress yang manis atau blouse santai yang kamu suka. Akhirnya kamu pun bisa lebih percaya diri dan nyaman dengan gaya berpakaian favorit.



CLASSY TOTE BAG

Liburan lebih bergaya

dan praktis dengan dilengkapi tote bag yang classy. Ukurannya yang sedikit lebih besar bisa menampung banyak barang yang kamu butuhkan, tetapi tetap bisa mempercantik gaya berpakaian kamu karena bentuknya yang classy. Tas ini juga dapat digunakan untuk Anda yang sering memiliki agenda meeting dan juga untuk kuliah.



ELEGANT MINI BAG

Sesuai namanya, mini bag sangat mudah dibawa saat melakukan kegiatan sehari-hari. Bentuk yang elegan dan biasanya dilengkapi dengan long dan short strap dapat semakin menunjang penampilan kamu. Tas ini dapat dibawa untuk menghadiri pesta ulang tahun teman, pergi menonton konser, atau sekadar hangout bersama teman-teman di mall atau cafe terdekat.



CASUAL HEEL SANDALS

Mengenakan sepatu sandal heels tentunya dapat menunjang penampilan dengan menonjolkan sisi manis serta feminin. Kamu bisa memadukannya dengan kaos polos dan celana jeans untuk bergaya santai namun tetap fashionable. Sepatu ini akan semakin terlihat ciamik saat dipadukan dengan setelan formal seperti blazer atau kemeja dan pencil skirt. (ist)



Mimpi Jokowi ... (dari hal 1)

Hampir setahun sudah, sekitar 45,6 juta siswa jenjang SD hingga SMA sederajat terpaksa melakukan pembelajaran daring. Ya...sektor pendidikan menjadi salah satu yang terdampak pandemi Covid-19 dan memicu kontroversi tajam. Sebab, bukan hanya tak optimal dalam proses transfer ilmunya, tapi keluhan ketiadaan gadget dan kuota data menjadi 'bumbu pahit' sekolah online. Tak hanya itu, banyak orangtua mengaku 'depresi' karena harus menjadi guru pendamping di rumah untuk segala mata pelajaran.

Presiden Jokowi pun menargetkan vaksinasi tenaga kependidikan bisa segera mencapai 5 juta orang. Tenaga kependidikan meliputi, guru, karyawan dan dosen ditargetkan selesai mengikuti vaksinasi Juni mendatang.

Dengan demikian, kata Jokowi, penerapan belajar atau sekolah tatap muka bisa berlangsung mulai Juli 2021 atau pada semester ganjil periode 2021/2022. Dengan catatan semua tenaga kependidikan sudah divaksinasi.

"Targetnya pada bulan Juni nanti 5 juta guru tenaga pendidik dan kependidikan semuanya Insyaallah sudah bisa segera kita selesaikan, sehingga bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali," kata Jokowi saat mengunjungi dalam peluncuran program vaksinasi untuk guru di SMAN 70 Jakarta Selatan, Rabu (24/02).

Jokowi menambahkan program vaksinasi untuk para guru dimulai pada hari ini. Vaksinasi tenaga kependidikan dimulai dengan 650 orang dari DKI Jakarta.

"Kita harapkan nanti setelah Provinsi DKI Jakarta, semua provinsi juga melakukan hal yang sama karena tenaga pendidik, kependidikan guru ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan," kata Jokowi,

Sekolah tatap muka secara nasional masih ditunda karena pandemi COVID-19. Hanya ada beberapa daerah yang menyelenggarakan belajar tatap muka seperti di Jambi. Pembukaan sekolah belum aman karena masih ada penularan seperti dialami sejumlah sekolah di Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Untuk pendidikan informal seperti pesantren sebagian sudah berjalan tatap muka pada semester genap awal 2021. Namun penularan di pesantren justru terjadi setelah santri kembali ke pondok. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 632 orang di pondok pesantren tertular dari santri yang kembali usai liburan di rumah.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan prioritas guru yang mendapatkan vaksinasi adalah guru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). "Prioritas vaksin dialokasikan untuk guru yang mengajar jenjang yang lebih muda dahulu. Dari jenjang PAUD, SD dan SLB baru kemudian jenjang SMP, SMA dan perguruan tinggi," ujar Nadiem di lokasi

sama.

Menurut Nadiem, hal itu dilakukan karena semakin muda peserta didik atau jenjang sekolah, semakin sulit melakukan pendidikan jarak jauh. "Siswa jenjang PAUD dan SD membutuhkan interaksi fisik dan pembelajaran tatap muka," katanya.

Sementara jumlah keseluruhan guru dan tenaga pendidik di Tanah Air baik swasta maupun negeri sebanyak 5,5 juta orang. Pelaksanaan vaksinasi bagi guru sendiri akan dikoordinasi masing-masing dinas kesehatan.

Nakes Belum Beres

Menurut data, vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan (nakes) yang sudah dimulai sejak awal Januari 2021 lalu hingga kini belum beres. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan vaksinasi tersebut bisa selesai pada akhir Februari ini.

Namun, hingga Selasa (23/02), nakes yang menerima vaksin dosis pertama baru mencapai 1.269.905 atau 86,46 persen dari sasaran nakes 1.468.764. Sementara penerima vaksin dosis kedua, baru mencapai 789.966 orang atau sekitar 53 persen.

Menanggapi hal ini, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, ada beberapa alasan yang menyebabkan vaksinasi COVID-19 pada nakes belum selesai sampai saat ini.

"Ada beberapa hal yang membuat tenaga kesehatan belum semuanya dapat divaksin, bisa terkait mekanisme vaksinasi mulai dari registrasi, pelaksanaan, juga sosialisasi program vaksinasi yang targeted," kata Prof Wiku.

Untuk mencapai target yang ditentukan, Prof Wiku meminta agar fasilitas kesehatan yang ada menjamin setiap nakes bisa divaksin sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, ia juga mengingatkan para penyelenggara vaksinasi untuk memperhatikan setiap kendala yang ada di lapangan.

Terkait stok persediaan vaksin Covid-19 di Indonesia kini menipis. "Saat ini stok

vaksin sebanyak 20 persen yang beredar di seluruh wilayah Indonesia yang didistribusikan di 13 ribu fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Bahkan, stok di beberapa Fasyankes menipis karena menjaga untuk vaksinasi kedua," ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi Minggu (21/02).

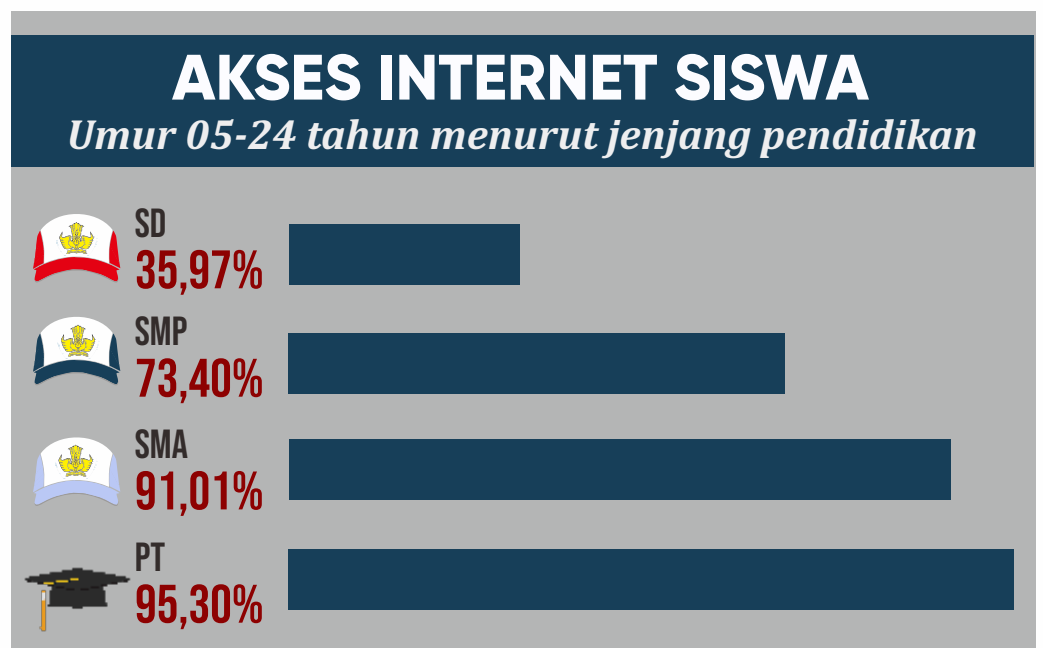
Semakin berkurangnya vaksin membuat pihaknya khawatir. Jangan sampai Nakes yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama namun belum mendapatkan vaksin kedua. "Karena kita (Indonesia) sangat tergantung pada produsen vaksin yang akan mengirimkannya," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, dia menambahkan, Dinas Kesehatan (Dinkes) fokus pada Fasyankes tertentu. Upaya ini dilakukan untuk lebih memudahkan distribusi vaksin di puskesmas dan rumah sakit yang jadi prioritas vaksin tahap I.

Sebab, dengan jumlah vaksin yang tersedia untuk Nakes tidak mungkin bisa membuat pihaknya bisa mendistribusikan ke seluruh Fasyankes karena jumlahnya yang sangat sedikit. Artinya kalau ketersediaan vaksin hanya 15 persen, maka pasti vaksin tidak akan bisa didistribusikan pada seluruh Fasyankes.

Selain itu, Siti Nadia melanjutkan Kemenkes juga mendistribusikan 7 juta dosis Vaksin Sinovac buatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penghasil Vaksin Bio Farma yang sudah mendapatkan izin edar darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Ini refill gap," ucapnya.

Kemudian, dia melanjutkan, vaksin dilanjutkan dan memprioritaskan imunisasi nakes yang tersisa atau yang belum divaksin. Oleh karena itu, pihaknya berharap nakes yang mengalami penundaan vaksin atau batal bisa membuat janji dengan Fasyankes, supaya bisa dihitung berapa yang divaksin. Kemudian jika stok vaksin masih ada maka bisa dilakukan penyuntikan. Tetapi kalau persediaan belum ada bisa dijadwalkan. (ist,ins)



NOW!!!Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURHj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURKUSNADI, SH., M.Hum
KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURH. ANWAR SADAD, M.Ag
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURSAHAT TUA P. SIMANJUNTAK, SH
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

RAPERDA PENGEMBANGAN PESANTREN GERBANG KESETARAAN PENDIDIKAN

SURABAYA – Untuk memperkuat pengembangan pondok pesantren di Jawa Timur (Jatim), DPRD Jatim menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Pesantren. Hal ini tidak lepas dari Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan jumlah pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama Islam yang cukup banyak.

Ketua Panitia Khusus Raperda Pengembangan Pesantren, Hartoyo mengungkapkan bahwa pondok pesantren mendapatkan animo masyarakat luas. Hal ini terbukti dari jumlah pondok pesantren di Jatim yang mencapai 6.661, dengan jumlah pendidik sebanyak 89.492 orang dan jumlah santri mencapai 1,7 juta.

Selain itu juga ada madrasah diniyah yang mencapai 26.867 lembaga dengan jumlah pendidik sebanyak 198.342 orang dan peserta didik sebanyak 1.460.474. Sedangkan untuk lembaga pendidikan Al Quran tercatat ada 38.895 lembaga, dengan jumlah pendidik mencapai 202.664 orang dan peserta didik sebanyak 2.570.885 anak.

Namun, kata Hartoyo, yang menjadi permasalahan adalah pondok pesantren mempunyai pola pendidikan berbeda. Sehingga, pendidikan yang ada di pondok pesantren dianggap bukan termasuk dalam pendidikan formal sehingga tidak mendapatkan pengakuan.

“Karena itulah, dibutuhkan formulasi kebijakan struktur yang setara dengan pendidikan formal dan diakui statusnya seperti pendidikan formal. Dan tentu dibutuhkan keberpihakan anggaran dari pemerintah, mengingat selama ini terdapat fakta ketimpangan pada lembaga pendidikan agama termasuk di pesantren,” tandas politisi Partai Demokrat ini.

Dia juga menambahkan, dalam hal pendanaan, pondok pesantren juga belum mendapatkan dana operasional yang jelas. Bahkan, madrasah diniyah dan pondok pesantren sering mendapatkan kendala dalam pengembangan di Kementerian Agama.

“Pendidikan agama menjadi urusan absolut termasuk dalam pembiayaan, tapi karena masuk dalam urusan pendidikan, maka pendidikan agama dan pondok pesantren bisa dibiayai pemerintah daerah,”

Dia menandatangani, dukungan pemerintah daerah bisa berupaya bantuan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi dan atau bagian keterampilan, sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah,

serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

“Pemerintah daerah membantu pendanaan pengembangan pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah. Maka pemerintah Provinsi Jatim dapat menjalankan kewenangannya,” tandasnya.

Dengan adanya Raperda ini, diharapkan Provinsi Jatim memiliki kekuatan hukum dalam pengembangan pondok pesantren yang masih menjadi subsistem pendidikan nasional. Sebab landasan hukum secara nasional tersebut belum menyentuh secara konkrit pada pondok pesantren.

Sementara itu, Wakil Ketua Satu Pansus Raperda Pengembangan Pondok Pesantren, Hasan Irsyad menambahkan bahwa yang menjadi tujuan dari Raperda pengembangan pesantren ini di antaranya adalah pendidikan. Artinya perda tersebut akan menyempurnakan pendidikan yang ada di pesantren tanpa merubah kearifan lokal yang ada di pesantren tersebut.

Pada sector pendidikan ini juga akan ada penyetaraan antara lulusan madrasah pesantren dengan lulusan lain seperti SMA, MA dan SMK. Sehingga, lanjut Hasan, tidak ada lagi perbedaan. Bahkan ketika masuk dalam dunia kerja juga tidak lagi dibedakan antara lulusan pesantren dengan yang lulusan umum.

“Goal utamanya akan mendukung kemandirian pesantren termasuk pembiayaan. Ijasah juga yang tidak diakui harus diakui oleh pemerintah. Sekarang ada raperda ini yang akan kita bicarakan, maka lulusan pondok pesantren tidak akan ada bedanya dengan lulusan SMA, SMK dan lainnya. Nantinya juga terkait dengan kerja dan kalau dari pesantren juga harus diterima,” tandasnya.

Sementara itu, Raperda tentang pengembangan pesantren ini sudah dinanti kalangan pengasuh pondok pesantren. Zahrul Azhar, pengasuh Queen Al-Azhar Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan, Jombang mengatakan bahwa keberadaan Raperda ini sudah ditunggu lama pihak pesantren untuk segera diputuskan.

“Saya melihat beberapa Fraksi yang respon positif dan tinggal mendorong disahkan dan Pemprov tinggal melakukan action,” katanya.

Gus Hans, sapaan akrabnya, mengharapkan dengan hadirnya Raperda ini membawa angin segar bagi kalangan pesantren. “Bagaimana lulusannya bisa diterima lebih luas



Ketua Pansus Raperda Pengembangan Pesantren, Hartoyo

lagi. Kan dulu beberapa pesantren ijasahnya tidak diterima dan dengan Raperda ini tenang juga para wali santri memodokkan anaknya,” katanya.

Dia juga berharap, dengan adanya raperda tersebut akan dapat meningkatkan fasilitas di pesantren. Di satu sisi, dia berharap pemerintah tidak memperlakukan pesantren hanya sebatas pantas pantasan saja, bukan by project.

“Seperti OPOP (one pesantren one product) itu. Pertama saya mengapresiasi tentang itu. Tolong jangan sampai kecolongan sebagai proyek saja. Jadi diperhatikan betul apakah pesantren itu memproduksi atau hanya mengakui perdukusi pihak lain,” tandasnya.

Gus Hans menekankan, sebenarnya yang paling dibutuhkan dari Raperda tersebut adalah adanya kepastian kelulusan dan kepastian legalitas yang sama dengan yang lain. Termasuk juga kepastian di dunia kerja.

“Itu yang paling penting. Tinggal itu di-konekkan. Bagaimana para santri bisa memiliki keahlian dan diserap oleh lapangan kerja. Harapan kita pemerintah bisa hadir ke sana dengan memberikan pelatihan pada santri dan lulusannya. Sehingga dia mencari ilmu agama itu tidak untuk mencari uang, tapi itu didakwahkan tanpa berniat mencari uang dari dakwahnya, melainkan mencari uang dari keahliannya,” pungas Gus Hans. (ufi/adv)

Foto: istimedia